

**PROFESIONALISME PENDAMPINGAN PROYEK P5 PADA
SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS: STUDI KEMANDIRIAN
GURU DI SMAN 1 GEDANGAN SIDOARJO**

**Professionalism in Mentoring Pancasila Student Profile (P5) Projects
for Students with Special Needs: A Study of Teacher Autonomy at
SMAN 1 Gedangan Sidoarjo**

Roudhoh Binuchillah & Aulya Ridwan

UIN Sunan Ampel Surabaya

06020122071@student.uinsby.ac.id; aridwan@uinsby.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 11, 2025 Dec 3, 2025 Dec 15, 2025 Dec 20, 2025

Abstract

The *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5) within the *Kurikulum Merdeka* is integrated to develop students who are competent, of strong character, and behave in accordance with Pancasila values, including students with special needs in inclusive education settings. In practice, regular teachers are required to provide equivalent support to all students, even though some do not have competencies as special assistant teachers (GPK) or a specific background related to P5 projects. Although previous studies have extensively discussed the implementation of P5 and learning support for children with special needs, there remains a limited number of studies examining the role of regular teachers as learning companions in P5 activities for all students, including those with special needs. This study aimed to analyze the professionalism of P5 project assistance for students with special needs, with a focus on the independence of regular teachers in managing inclusive classes at SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. The research employed a qualitative method with a field study at SMAN 1 Gedangan Sidoarjo, collecting data through interviews with several informants, field observations, and an

in-depth literature review. The findings indicate that the planning process prior to P5 implementation is arranged through collaborative meetings between regular teachers and GPK teachers, enabling regular teachers to independently apply assistance strategies that are aligned with the P5 activity flow in the school. This study affirms that regular teachers play a crucial role in providing inclusive and professional P5 assistance for students with special needs, with implications for strengthening teacher training, optimizing collaboration with special assistant teachers, and developing flexible P5 strategies that are more responsive to student needs in inclusive classrooms.

Keywords: Teacher Professionalism; P5 Mentoring; Independence of Regular Teachers; Students with Special Needs; Inclusive Education

Abstrak: Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka diintegrasikan untuk membentuk peserta didik yang kompeten, berkepribadian, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, termasuk siswa berkebutuhan khusus dalam satuan pendidikan inklusif. Dalam praktiknya, guru reguler dituntut mampu memberikan pendampingan setara kepada seluruh peserta didik meskipun sebagian tidak memiliki kompetensi sebagai guru pendamping khusus (GPK) maupun latar belakang khusus terkait proyek P5. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas pelaksanaan proyek P5 dan pendampingan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), kajian mengenai peran guru reguler sebagai pendamping pembelajaran pada kegiatan P5 bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa ABK, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis profesionalisme pendampingan proyek P5 pada siswa berkebutuhan khusus dengan fokus pada kemandirian guru reguler dalam mengelola kelas inklusi di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo, melalui pengumpulan data berupa wawancara dengan beberapa narasumber, observasi lapangan, serta tinjauan literatur yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur perencanaan sebelum kegiatan P5 dilaksanakan disusun melalui rapat kolaborasi antara guru reguler dan guru GPK, sehingga guru reguler secara mandiri dapat menerapkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan alur kegiatan P5 di sekolah. Studi ini menegaskan bahwa guru reguler memegang peran krusial dalam memberikan pendampingan P5 yang inklusif dan profesional bagi siswa berkebutuhan khusus, dengan implikasi perlunya penguatan pelatihan, optimalisasi kolaborasi dengan guru pendamping khusus, serta pengembangan strategi P5 yang fleksibel agar lebih responsif terhadap kebutuhan siswa di kelas inklusi.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru; Pendampingan P5; Kemandirian Guru Reguler; Siswa Berkebutuhan Khusus; Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Salah satu Program yang sudah tidak asing dalam dunia pendidikan, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam sistem kurikulum merdeka. Program kokurikuler yang digalakkan dalam rangka meningkatkan keterlibatan sosial dan perkembangan akademis siswa, serta memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lebih

baik dalam lingkungan sekolah. Dalam program ini terdapat suatu pendekatan pendidikan yang dirancang untuk mewujudkan pemberdayaan siswa dari segi akademis, pengembangan karakter, dan keterampilan sosial. Peserta didik dalam hal ini dibiasakan agar mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta dapat berkontribusi positif kepada masyarakat di sekitar (Khotrunada & Widiyanah, 2024). Maka dari itu, sekolah yang dapat memanfaatkan pembelajaran P5 secara efisien dalam proses pendidikannya memiliki harapan agar program ini dapat menjadi alat yang ideal untuk mendorong semangat dan keinginan seluruh peserta didiknya untuk menjadi pelajar yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Mahardhika & Sujarwanto, 2024). Berdasarkan Permendikbud Ristek nomor. 56/M/2022 tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan sebuah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang digalakkan dengan upaya pencapaian kompetensi serta karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Menurut peraturan tersebut tercantum penjelasan mengenai kegiatan P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang berfokus pada pengamatan pemberian solusi terhadap berbagai problematika yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam materi P5 ini kegiatan pembelajaran termasuk dalam kegiatan kokurikuler berbasis suatu proyek sesuai dengan tujuan serta pencapaian kompetensi bagi peserta didik. Dalam hal ini, kegiatan P5 disusun sesuai standar kompetensi lulusan secara lebih fleksibel dalam aspek muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Sehingga selama kegiatan proyek berlangsung, sekolah akan melaporkan hasil, melakukan evaluasi, serta tindak lanjut pelaksanaan P5 pada kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan (Imrotin & Badrih, 2023).

Dalam konteks pendidikan yang inklusif, penting untuk memahami bagaimana guru dapat beradaptasi dan menerapkan strategi yang efektif untuk mendukung keberhasilan siswa, termasuk memberikan pendampingan yang setara serta menjadi fasilitator bagi seluruh peserta didiknya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pemerintah telah memberlakukan pendidikan wajib belajar. Saat ini, pendidikan di Indonesia telah menjadi lebih baik, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pendidikan inklusi semakin berkembang di hampir semua jenjang dan di banyak kota. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2013, hak dan kewajiban anak ABK (ABK) untuk mendapatkan pendidikan dipenuhi melalui pengembangan pendidikan inklusi. Didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap manusia, pendidikan inklusif membantu meningkatkan rasa sosial anak normal terhadap anak ABK (Rizqianti et al., 2022).

Seperti yang kita ketahui dalam satuan pendidikan, peserta didik dengan kebutuhan khusus (ABK) akan didampingi oleh guru pendamping khusus (GPK) yang tahu bagaimana cara membimbing serta menangani siswa ABK di sekolah. Selain itu GPK juga mengatur metode, strategi, dan pendekatan pada pendidikan inklusif. Perannya sangat lekat dalam setiap proses pembelajaran terhadap peserta didik yang memiliki keterbatasan dan perbedaan fisik dan psikis. Sehingga siswa ABK akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belajar yang diinginkan. Oleh karena itu, tugas guru tidak hanya mengajar dengan ceramah atau mendikte tanpa mempertimbangkan bakat, kemampuan, dan minat masing-masing siswa, tetapi juga memastikan bahwa sekolah memberikan layanan terbaik untuk seluruh peserta didiknya terlebih pada siswa ABK (Habibah et al., 2024).

Sekolah harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK), menerima pendidikan yang sama untuk semua siswa dalam Kurikulum Merdeka. Dalam kenyataannya, lebih banyak sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif, tetapi tidak semuanya didukung oleh guru pendamping khusus (GPK) yang cukup. Kondisi ini menempatkan guru reguler sebagai peran utama dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendampingan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sehingga guru reguler perlu menguasai kompetensi profesional yang lebih baik dan kemampuan adaptif yang lebih baik untuk mengelola kelas yang heterogen. Adapun juga ketika dalam satuan pendidikan tertentu belum dapat menyediakan tenaga pendidik khusus atau GPK bagi siswa ABK, terlebih sekolah negeri berbasis toleransi dan inklusi? Tentunya tantangan bagi guru reguler akan semakin besar yang akan dinilai dari segi profesionalisme serta keahlian sebagai seorang tenaga pendidik. Hal ini dapat menyentuh aspek kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, dalam Pasal 10 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan empat kompetensi yang perlu dimiliki guru yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi. Keterlibatan ini bersangkutan dengan kompetensi guru yang terdiri dari perilaku kognitif (pengetahuan), afektif (nilai-nilai), dan psikomotorik (keterampilan). Ketika guru memiliki kemampuan untuk memperkuat spiritualnya, mereka dapat mengajarkan peserta didik tidak hanya tentang pengetahuan tetapi juga tentang nilai—nilai yang terkandung dan nilai psikomotorik atau pengamalan (Bayhaqi et al., 2024).

Pada studi sebelumnya mengenai proyek P5, focus penelitian lebih banyak berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, penguatan karakter peserta didik, dan strategi pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK) dalam pembelajaran inklusif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut tetap menempatkan guru pendamping khusus (GPK) sebagai pihak utama dalam proses pendampingan, sementara peran guru reguler diposisikan sebagai pelaksana teknis tanpa kajian mendalam mengenai tingkat kemandirian dan profesionalismenya. Selain itu, pada aspek pendampingan siswa ABK dalam konteks Pendidikan inklusif umumnya berfokus pada peran guru GPK yang dapat memberikan *treatment* khusus bagi siswa ABK. Padahal keberhasilan pelaksanaan P5 di sekolah inklusif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan GPK, tetapi juga oleh kemampuan guru reguler dalam mengelola kelas yang heterogen, menerapkan prinsip pembelajaran inklusif, serta bertindak sebagai fasilitator pembelajaran berbasis proyek bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa ABK. Sehingga berdasarkan telaah pada penelitian sebelumnya, masih terdapat keterbatasan kajian mengenai profesionalisme dan kemandirian guru reguler dikembangkan dan diimplementasikan dalam pendampingan kegiatan P5 bagi siswa berkebutuhan khusus. Padahal, peran guru reguler menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan P5 di sekolah berbasis inklusif. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini secara lebih spesifik berfokus pada peran guru reguler sebagai pendamping utama P5 bagi siswa ABK, terutama pada kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam menyediakan guru pendamping khusus. Sehingga kebaruan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek implementasi P5, integrasi Pendidikan inklusif, dan pembelajaran basis diferensiasi. Tetapi juga mengkaji bagaimana guru reguler membangun kemandirian profesional melalui kolaborasi dengan GPK, perencanaan modul P5 yang adaptif, serta praktik pendampingan yang responsif terhadap kebutuhan siswa ABK.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam profesionalisme pendampingan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada siswa berkebutuhan khusus dengan fokus pada kemandirian guru reguler dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan P5 kelas inklusif di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji mengingat kebijakan dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter melalui proyek P5 secara lebih kontekstual dan inklusif. Tanpa dukungan strategi pendampingan yang tepat dari guru reguler, pelaksanaan P5 berpotensi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa ABK. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan

bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam merancang pelatihan guru, penguatan kolaborasi dengan guru GPK, serta penyusunan modul P5 yang lebih adaptif klasifikasi keberagaman peserta didik dalam satuan pendidikan.

Sesuai dengan penjabaran diatas, kompetensi guru akan mempengaruhi aspek profesionalisme saat menjadi tenaga pendidik di satuan pendidikan. Terlebih lagi dalam pelaksanaan kegiatan P5 yang menuntut seluruh guru tanpa memandang latar belakang keahlian mereka sesuai mata pelajaran masing-masing, guru akan dituntut untuk bisa mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan P5 dengan perbedaan keadaan dan tipologi siswa di dalam kelas. Maka dari itu, disusun lah penelitian ini dengan tujuan menganalisis terkait peran seorang guru reguler (non-GPK) yang secara mandiri harus bisa mengelola pembelajaran dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada siswa ABK di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. Melalui penelitian ini diharapkan sekolah dalam satuan pendidikan dapat memberikan pelatihan secara lebih intensif kepada guru reguler sebelum pelaksanaan P5, sehingga dapat memaksimalkan pendampingan bagi siswa ABK.

Kerangka teoritik Dalam penelitian ini bertumpu pada tiga landasan utama yakni: pendidikan inklusi atau pembelajaran basis diferensiasi, proyek P5, dan profesionalisme guru. Ketetapan Pendidikan inklusi tercantum dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009, menegaskan bahwa semua siswa, termasuk ABK, berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif di sekolah reguler. Selain itu, menurut Carol Ann Tomlinson, teori pembelajaran berdiferensiasi menekankan bahwa guru harus menyesuaikan konten, prosedur, dan lingkungan belajar sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. Oleh karena itu, strategi pendampingan yang fleksibel merupakan aspek yang sangat penting dalam kelas inklusif. Ketetapan Teori P5 dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Ristek No. 56 Tahun 2022, bahwa P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek lintas disiplin yang menumbuhkan karakter, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian siswa melalui pengalaman belajar yang benar. Selain itu, berdasarkan perspektif Jejen Musfah (2012), profesionalisme guru berarti kemampuan guru untuk mengelola kelas inklusi secara mandiri, adaptif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seluruh teori ini digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami peran dan kemandirian guru reguler yang dapat memberikan pendampingan P5 kepada siswa ABK secara efektif dan profesional di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan studi lapangan di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik yang dialami partisipan. Selain itu, fokus dari penelitian ini pada aspek Strategi Kemandirian Guru dalam Pengelolaan Siswa ABK pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo. Dalam hal ini, memungkinkan sekali timbul adanya tantangan bagi para guru reguler untuk bisa mengelola kegiatan P5 bersama peserta didik terlebih ABK tanpa mengurangi profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik.

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran guru reguler dan kemandirian mereka saat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Desain studi kasus pada penelitian ini berfokus pada satu konteks tertentu pelaksanaan P5 di sekolah menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat masalah secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan desain studi kasus ini, memungkinkan penggalan data menyeluruh tentang pengalaman, persepsi, dan strategi guru reguler dalam menangani masalah pendampingan P5 di kelas inklusif.

Partisipan penelitian terdiri dari Waka Kurikulum dan Guru reguler pendamping proyek P5 sebagai sumber informasi utama. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pendalaman informasi dari subjek yang memiliki pengalaman langsung dalam pendampingan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di lingkungan sekolah inklusif.

Instrumen utama penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data mengenai pemahaman guru reguler terhadap konsep P5 inklusif, pengalaman pendampingan siswa ABK, bentuk kolaborasi dengan guru pendamping khusus (GPK), serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan P5. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dilakukan secara langsung dengan waka kurikulum dan guru reguler pendamping proyek P5.

Data yang telah dikumpulkan, di analisis secara kualitatif melalui tahapan, reduksi data, tinjauan literatur, dan penyusunan Kesimpulan penelitian. Data dari hasil wawancara

terlebih dahulu direduksi dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dianalisis kembali dan dikaitkan dengan berbagai sumber tinjauan literatur dari berbagai artikel jurnal ilmiah terdahulu. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah diverifikasi, sehingga diperoleh temuan yang valid.

HASIL

Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 1 Gedangan merupakan regulasi yang telah direncanakan melalui beberapa tahap formula setiap satu tahun ajaran. Hingga tahun ajaran 2024/2025 ini sekolah telah melaksanakan kegiatan P5 tiga kali berturut-turut sejak berlakunya kurikulum merdeka, dengan berbagai formula dan strategi yang berbeda. Mengapa demikian? Hal tersebut dimaksudkan untuk penyesuaian dengan sistem dan program sekolah yang lainnya, serta memperhatikan keefektifan pelaksanaan proyek P5. Dalam tahap perencanaan P5 di tahun ajaran ini, sekolah memiliki strategi pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dari kelas X hingga XII dengan jumlah keseluruhan tujuh tema yang dikuasai peserta didik. Berikut klasifikasinya:

1. Kelas X melaksanakan 3 tema
2. Kelas XI melaksanakan 2 tema, dan
3. Kelas XII melaksanakan 2 tema

Satu tema P5 akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu Minggu penuh dari hari Senin di jam pertama hingga hari Jum'at di jam terakhir. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber di SMAN 1 Gedangan, dapat diperoleh hasil dari pihak Waka Kurikulum menuturkan bahwa: “Kegiatan P5 merupakan suatu proyek yang membutuhkan perhatian ekstra, sebab kegiatan sebenarnya bukanlah sesuatu yang cukup menarik sehingga banyak guru dengan berbagai latar belakang yang berbeda diharuskan untuk mendampingi kegiatan P5 yang mungkin tidak sesuai dengan keahlian mereka dan banyak didapati hal yang kurang kondusif. Oleh karena itu pada tahun ajaran ini, pihak sekolah menemukan formula baru dimana satu tema P5 akan dilaksanakan dalam 1 pekan penuh kemudian diakhiri dengan panen karya atau gelar karya sehingga peserta didik bisa lebih fokus pada proyek P5 ini (Waka Kurikulum, 2025). Menurut keterangan tambahan dari narasumber yakni: “pada tahun ketiga pelaksanaan proyek P5 kurikulum merdeka dan pada

tahun ajaran 2024/2025 menjadi kegiatan yang paling terstruktur dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya”(Waka Kurikulum, 2025). Dari sudut pandang guru P5, terdapat sedikit perbedaan dalam aspek indikator keberhasilan siswa saat proyek berlangsung, terlebih bagi siswa ABK akan mendapat nilai plus ketika mereka bersedia untuk ikut berkontribusi dari awal hingga akhir sesuai keinginan mereka sendiri. Fokus disini guru tidak memaksa kehendak siswa, karena dikhawatirkan siswa ABK akan merasa kurang nyaman.

PEMBAHASAN

Pendampingan P5 oleh Guru Reguler Bagi Siswa ABK

1. Pembelajaran berbasis Inklusif

Menurut (Tomlinson & Imbeau, 2023) menyatakan bahwa guru harus menyesuaikan materi, prosedur, dan produk pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Upaya guru untuk memahami karakteristik siswa ABK dan membuat strategi pendampingan sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. Melalui teori tersebut, terdapat perspektif bahwa Setiap siswa memiliki kebutuhan, kesiapan, dan profil belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus mengubah konten, proses, dan produk pembelajaran agar semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang bermakna. Prinsip ini sejalan dengan pendidikan inklusi, yang menempatkan keberagaman sebagai dasar strategi pembelajaran, sehingga siswa berkebutuhan khusus menerima dukungan yang setara melalui metode dan lingkungan belajar yang fleksibel. Dalam penelitian ini, kemampuan guru untuk menyesuaikan strategi P5 untuk siswa ABK secara teratur menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata dalam pembelajaran. Sehingga Tomlinson menegaskan bahwa guru harus mengelola kelas secara responsif, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan unik siswa. Selain itu Menurut Pasal 15 UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan khusus didefinisikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk siswa ABK atau siswa dengan kecerdasan luar biasa yang diberikan secara inklusif dalam satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, yang mengatur tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (Kasman, 2020). Pada pendidikan berbasis inklusif, guru harus mendampingi siswa dengan kebutuhan Khusus serta memenuhi segala kebutuhannya. Tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “peserta didik yang berhak mendapatkan pendidikan inklusif di institusi

pendidikan yakni Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial, serta siswa yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan”. Sebuah satuan pendidikan yang menyediakan pembelajaran berbasis inklusif perlu memberikan fasilitas penuh serta mendukung segala hal yang dapat mensukseskan program pembelajaran tersebut seperti contoh, Kurikulum yang cukup fleksibel sebagai wadah siswa untuk beradaptasi pada dunia pendidikan sesuai jenjang masing-masing, adanya evaluasi untuk menunjukkan hasil kemampuan siswa serta tindak perbaikan kedepannya, penyesuaian baik dari segi sarana prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh peserta didik, Proses identifikasi dan asesmen yang akurat untuk menyusun program pendidikan yang objektif. Untuk itu, sekolah dalam satuan pendidikan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan seluruh siswa tanpa diskriminasi (Kasman, 2020). Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam pendidikan inklusif di sekolah, yakni:(Dewi et al., 2024)

- a. Sekolah perlu menciptakan dan mempertahankan lingkungan kelas yang ramah, inklusif serta menerima perbedaan karakteristik siswa. Selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang mewadahi seluruh siswa, dengan menekankan bahwa semua anak dihargai berdasarkan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, agama, dan faktor lainnya. Sehingga Metode pembelajaran yang digunakan perlu variasi yang lebih banyak seperti: interaktif, kooperatif, tematik, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penilaian autentik yang digunakan oleh guru dalam kelas berbasis inklusif.
- b. Kelas inklusif berarti pembelajaran lebih fokus dan berpusat pada siswa, terutama pada perbedaan karakteristiknya. Dengan begitu, sekolah juga perlu menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. Sehingga kurikulum menjadi lebih fleksibel dan layanan dapat digunakan secara luas.
- c. Lembaga pendidikan setidaknya-tidaknya memiliki guru pendamping khusus (GPK) yang akan membantu guru mata pelajaran baik dalam mengidentifikasi berbagai macam karakter siswa hingga selama proses belajar untuk mendukung siswa ABK dengan masalah perkembangan, konsentrasi, emosi, dan lain sebagainya.
- d. Guru membimbing dan membantu siswa ABK untuk berbaur dengan teman sebaya di kelas dalam pembelajaran kelompok maupun individu dan memastikan seluruh siswa dapat berkoordinasi dengan baik serta bersikap toleransi kepada siswa ABK.

e. Sekolah harus memiliki data setiap siswa ABK yang masih aktif di sekolah tersebut, meliputi informasi khusus dari orang tua siswa dan orang terdekat siswa. Ini akan memungkinkan guru untuk lebih mudah menangani dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan siswa ABK.

Selain pernyataan diatas yang mengharuskan sekolah inklusi menyediakan beberapa fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, peran guru juga sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran di sekolah. Melihat bahwa guru lah yang lebih dekat dengan peserta didiknya serta memberikan pengajaran selama di kelas. Jikalau beberapa sekolah belum dapat menyediakan fasilitas guru pendamping khusus ABK, maka dalam hal ini guru reguler perlu menghadirkan *treatment* serta *effort* lebih banyak ketika mengajar kelas inklusi. Salah satunya terletak pada strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh seluruh siswa. Strategi tersebut harus benar-benar dapat memberikan rangsangan kepada siswa ABK agar memiliki interaksi sosial yang tinggi. Hal tersebut bisa dicapai dengan mengintegrasikan kegiatan atau pembelajaran berkelompok, proyek kolaboratif antar individu dalam salah satu strategi pembelajaran. Dalam hal ini, penting bagi guru untuk selalu memperhatikan perkembangan setiap siswa ABK kemudian diselingi dengan pemberian dukungan yang sesuai dengan siswa tersebut untuk memastikan siswa APK dapat berpartisipasi secara optimal pada kegiatan di kelas. Pemahaman mengenai kebutuhan setiap peserta didik serta penggunaan strategi yang tepat oleh guru dapat menjadi salah satu faktor kunci untuk menciptakan lingkungan inklusif di sekolah agar semua anak terutama siswa ABK, dapat berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal (Septianingsih et al., 2024).

2. Pendampingan P5 berbasis Inklusif oleh Guru Reguler

Menurut UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang beriman, berkarakter, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam proyek P5, kegiatan pembelajaran memberikan ruang untuk pengalaman nyata dan partisipasi aktif peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru reguler membimbing siswa ABK dalam proses kreatif dan kolaboratif P5 sejalan dengan mandat undang-undang bahwa semua siswa harus menerima kesempatan belajar yang adil. Sedangkan Menurut Permendikbud Ristek no. 56 tahun 2022 menetapkan bahwa P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan dimensi Profil Pelajar Pancasila melalui pengalaman belajar yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Regulasi ini menekankan

fleksibilitas pelaksanaan dan kemampuan guru untuk membantu siswa memecahkan masalah kontekstual. Praktik pendampingan guru rutin terhadap siswa ABK dalam penelitian ini menunjukkan pelaksanaan prinsip P5, karena guru memiliki kemampuan untuk menyesuaikan alur kegiatan dan strategi pendampingan agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan setara. Program P5 yang diterapkan pada Sekolah Menengah Atas menunjukkan antusiasme yang tinggi dan sikap yang sangat positif dari seluruh siswa. Kegiatan P5 berfokus sebagai kunci dari komponen pada kurikulum ditujukan untuk mendukung kreativitas, kemandirian, dan pembelajaran gotong royong seluruh siswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang dikeluarkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, menjelaskan bahwa siswa harus bisa mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan masalah yang ada untuk mengembangkan potensi tersebut, serta hubungannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Siswa juga akan memperoleh pemahaman tentang peluang masa depan, kesadaran akan kebutuhan masyarakat, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kesiapan untuk menjadi tenaga kerja profesional yang baik. Siswa diminta untuk melihat, mempelajari, dan menciptakan solusi untuk masalah di lingkungan sekitar mereka melalui pembelajaran berkolaborasi lintas disiplin ilmu dalam beberapa proyek P5 ini. Selain itu pengembangan P5 di sekolah juga melibatkan kegiatan deklarasi sekolah ramah anak. Sehingga Sekolah inklusi yang telah mengadopsi deklarasi sekolah ramah anak, memiliki tujuan untuk membuat siswa merasa nyaman saat belajar di sekolah dengan menghilangkan tindakan bullying serta memiliki perspektif bahwa kekerasan akan mempengaruhi kualitas pendidikan.

Teori kompetensi guru diperkuat oleh profesionalisme guru reguler yang ditunjukkan oleh kemandirian dalam pendampingan P5, kesiapan untuk mengikuti pelatihan, dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh (Musfah, 2011) yakni Penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang saling melengkapi dalam praktik pembelajaran membentuk profesionalisme guru. Ia menegaskan bahwa peningkatan profesionalisme tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga melalui pelatihan terus-menerus dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Pandangan Musfah memperkuat bahwa guru harus mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan responsif terhadap berbagai macam siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dalam konteks pendidikan inklusi dan P5. Indikator Keberhasilan siswa ABK bergantung pada peran guru reguler di

sekolah dan guru pendamping khusus dalam rangka memaksimalkan layanan pembelajaran untuk siswa ABK di kelas. Dengan begitu Pihak sekolah dan tenaga pendidik juga perlu mengadakan Pelatihan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kinerja guru dalam mewujudkan pembelajaran inklusif yang lebih efektif. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan P5 yang mengharuskan seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dari awal hingga kegiatan gelar karya, sebagai wujud pengembangan kreativitas dan kerja sama di sekolah. Sejalan dengan hal ini, guru yang bertugas melakukan pendampingan P5 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, terutama bagi siswa ABK. Salah satu strateginya yakni, seluruh peserta didik dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok, bertukar ide, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih percaya diri dan siap dalam proses belajar, dengan adanya peran aktif dalam penelitian dan kegiatan berbasis proyek. Pendampingan Kegiatan P5 oleh guru ketika di kelas tidak jauh berbeda dengan pendampingan guru saat pembelajaran mata pelajaran pada umumnya. Mengingat bahwa SMAN 1 Gedangan merupakan sekolah berbasis inklusif dan toleransi dengan berbagai karakteristik peserta didik. Narasumber menjelaskan bahwa: “SMAN 1 Gedangan sudah berpengalaman untuk mengajar dan mendidik siswa ABK. Sehingga pendampingan yang dilakukan saat P5 oleh guru juga tidak jauh berbeda dengan pendampingan pada pembelajaran mata pelajaran sehari-hari. Dalam hal ini perlu digaris bawahi, kunci dari kegiatan P5 bukan pada materi pelajaran, namun lebih fokus pada potensi, keterampilan, dan jiwa seni yang ada dalam diri seluruh siswa, dan pada aspek tersebut kemungkinan siswa ABK justru memiliki keahlian yang lebih baik dari siswa reguler”(Waka Kurikulum, 2025). Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa pihak sekolah benar-benar memperhatikan antara kepentingan yang akan dihadapi guru dalam pendampingan P5 serta kebutuhan peserta didik yang dapat tercukupi dengan baik dan maksimal.

Tantangan yang dihadapi guru reguler dalam melaksanakan pendampingan P5 bagi siswa ABK

Kegiatan yang terstruktur dengan baik tetap akan menemui tantangan dan kendala dalam pelaksanaan, sama halnya dengan kegiatan P5 di SMAN 1 Gedangan melalui beberapa kendala dan tantangan seperti, tidak semua guru yang masuk dalam tim proyek memiliki keahlian dalam bidang P5, namun untuk itu jiwa profesional guru dituntut untuk senantiasa

mengupgrade diri serta bisa belajar sedikit demi sedikit terkait mekanisme kegiatan P5. Menurut keterangan dari narasumber yakni guru yang ikut serta mendampingi siswa dalam kegiatan P5 Menuturkan bahwa, “tantangan yang dihadapi seorang guru dalam mendampingi kegiatan P5, salah satunya terletak pada pemberian stimulus dan instruksi pada saat kegiatan P5 berlangsung, terlebih bagi siswa ABK, dalam hal ini, guru reguler perlu mengetahui karakteristik siswa dalam satu kelas, terutama pada siswa ABK perlu dilakukan analisis terkait kesulitan apa yang dihadapi siswa tersebut sebelum masuk kelas, sehingga langkah pendampingan yang akan diambil oleh guru tepat sesuai kebutuhan siswa ABK.”(Guru P5, 2025) Guru reguler perlu melakukan diskusi khusus dengan guru GPK terkait kebutuhan siswa ABK sesuai klasifikasi karakteristiknya. Seperti contoh, peserta didik dengan kesulitan slow learner atau slow respon, maka guru perlu memberikan pendekatan pembelajaran dengan penyederhanaan instruksi serta dilakukan berulang kali. Adapun tantangan lain yang dijelaskan oleh narasumber yakni, “jika ada siswa ABK yang ditinggalkan atau dikucilkan saat kegiatan pembelajaran, maka akan diserahkan pada guru BK”.(Guru P5, 2025) Sehingga tugas guru pendamping harus memastikan seluruh siswa berpartisipasi dengan adil tanpa adanya diskriminasi saat kegiatan p5 berlangsung.

Dalam berbagai kasus, guru reguler pada kelas inklusi pasti akan menghadapi berbagai tantangan serta problematika yang cukup kompleks mulai dari beban kerja yang tinggi hingga tuntutan profesional bagi siswa ABK secara lebih spesifik. Secara tidak langsung, guru reguler dituntut untuk memilih kapasitas yang tinggi dalam aspek pedagogi basis diferensiasi, pengelolaan kelas serta keterampilan komunikasi yang efektif dalam menjelaskan pembelajaran bagi siswa ABK. Adapun hal yang paling penting guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan siswa ABK satu persatu cara tepat sehingga akan memudahkan pemberian strategi pembelajaran serta pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, guru perlu memiliki strategi manajemen kelas yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk mengurangi tekanan kerja, Selain itu juga diperlukan pelatihan intensif bagi guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dalam menangani siswa ABK (Ratnaningrum et al., 2025).

Dalam banyak penelitian lainnya juga dipaparkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pendampingan pada siswa ABK sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan komunikasi dengan siswa ABK

Beberapa siswa ABK memiliki kesulitan dalam aspek komunikasi, sehingga mereka kadang membutuhkan alat bantu maupun instruksi verbal agar dapat memahami penjelasan dari guru. Dalam hal ini, guru memerlukan pendekatan yang lebih intensif untuk dapat mengoptimalkan partisipasi siswa tersebut saat kegiatan pembelajaran (Ardelin & Sunarso, 2024).

2. Sarana dan prasarana yang minim dan kurang mendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif

Banyak sekolah reguler masih belum memiliki fasilitas fisik yang mendukung, seperti jalur khusus untuk kursi roda, toilet ramah disabilitas, maupun media pembelajaran yang dapat disesuaikan. Kurangnya aksesibilitas ini membatasi pergerakan serta kenyamanan belajar siswa penyandang disabilitas (Gibtia et al., 2025). Dalam suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan berbasis inklusi, harus disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terlebih bagi siswa ABK. Sebab keterbatasan sarana dan prasarana dapat berdampak pada pelayanan pendidikan yang kurang bermutu (Munawir et al., 2025).

3. Keterbatasan kompetensi serta pelatihan yang kurang memadai

Tantangan tersebut sering dialami oleh guru reguler (non-GPK) dalam satuan pendidikan banyak guru reguler masih belum mendapatkan pelatihan secara komprehensif strategi pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi tersebut, mengakibatkan guru reguler kesulitan untuk mengelola kelas inklusi (Agustaria et al., 2025).

4. Tidak tersedianya satupun Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam satuan pendidikan

Dalam suatu lembaga pendidikan berbasis inklusif, perlu sekurang-kurangnya 1-2 guru pendamping khusus. Dengan tujuan membantu pengklasifikasian siswa berkebutuhan khusus serta memberikan penanganan intensif terhadap mereka. Namun dalam beberapa kasus, ketersediaan guru GPK sangat terbatas, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelayanan yang dibutuhkan oleh beberapa siswa dengan kesulitan yang berbeda.

5. Rendahnya keterlibatan orang tua siswa ABK

Beberapa beberapa orang tua masih memiliki perspektif negatif terhadap kemampuan seorang anak serta kurang memahami urgensi dari pendidikan inklusif sehingga hal ini dapat menyulitkan guru untuk membangun kerjasama dan mendukung proses belajar anak ABK cara optimal (Mustika et al., 2025).

Pendampingan P5 bagi siswa ABK oleh Guru Reguler di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo

Sebelum melaksanakan seluruh kegiatan dan program sekolah, tentunya sebuah lembaga pendidikan perlu melakukan persiapan serta perencanaan secara terstruktur. Proses perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak sekolah seperti: kepala sekolah, para-Waka sekolah, staf yang bersangkutan, guru atau tenaga pendidik yang nantinya akan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan P5. Seluruh alur persiapan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga evaluasi perlu dilakukan secara runtut agar kegiatan proyek P5 dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai capaian pembelajaran yang diharapkan (Rosmiati et al., 2025). Setiap tahunnya dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 1 Gedangan, pihak sekolah akan mendatangkan guru pendamping Khusus siswa ABK. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendata ulang secara rutin siswa-siswa di SMAN 1 Gedangan yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya dilaksanakan sebuah rapat bersama GPK dan para guru reguler yang nantinya akan mendampingi peserta didik dalam kegiatan P5. Dalam rapat tersebut seluruh guru akan memaparkan setiap kendala yang dialami selama proses pembelajaran dengan siswa ABK, dengan begitu guru GPK dapat memberikan masukan, saran serta tindakan yang tepat untuk dapat memberikan strategi yang lebih tepat kedepannya. Namun, dalam pelaksanaan strategi yang diberikan oleh guru GPK harus dilaksanakan secara mandiri oleh seluruh guru reguler yang nantinya akan mendampingi siswa dalam kegiatan P5. Sehingga aspek profesionalisme seorang guru reguler akan dinilai dalam hal ini, mengenai segala kompetensi yang telah dipelajari serta bekal strategi dari guru GPK untuk dapat mengelola kegiatan P5 di kelas terutama bagi siswa ABK.

Pendampingan Guru dalam kegiatan P5 di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo tidak lepas dari peran Satuan Pendidikan tersebut yang diawali dengan pembentukan tim proyek P5 oleh pihak Sekolah. Dalam setiap tim proyek tersebut, terdapat satu koordinator yang dipilih sesuai aspek pengalaman dan kemahiran dalam kegiatan proyek P5. Selanjutnya tim proyek

inilah yang akan menyusun draft modul kegiatan P5 sesuai alur, tujuan pembelajaran, hingga alokasi waktu dari awal hingga kegiatan gelar karya, sehingga susunan dari draft modul ini harus benar-benar terstruktur. Menurut keterangan dari narasumber, yakni guru reguler yang mendampingi kegiatan P5 di SMAN 1 Gedangan menegaskan bahwa, “Sebelum masuk kelas, seluruh guru pendamping dari berbagai latar belakang keahlian bidang mata pelajaran akan membentuk sejumlah tim proyek, kemudian rapat diskusi diselenggarakan dengan mendatangkan guru khusus bagi siswa ABK. Dalam rapat tersebut seluruh kendala dalam kelas akan dibahas hingga menemukan penyelesaian bersama”. Berikut beberapa tahapan yang akan dilakukan pihak sekolah dan guru sebelum masuk kelas dan mendampingi peserta didik pada kegiatan P5 sebagai berikut:

1. Sebelum masuk ke kelas, guru berdiskusi dengan tim proyek untuk membuat modul P5, kemudian melakukan koordinasi dengan pimpinan tim proyek.
2. Rapat teknis pelaksanaan P5 diselenggarakan untuk analisis bersama terkait modul yang telah disusun setiap tim proyek, yang dilanjutkan dengan presentasi masing-masing modul P5.
3. Setelah melakukan diskusi dan dirasa modul yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka akan disepakati bersama dalam rapat tersebut.
4. Guru bertanggung jawab untuk menyiapkan segala kebutuhan terkait sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik saat kegiatan P5 berlangsung.
5. Setiap tim proyek harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan melalui via room chat WhatsApp group terkait seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan di kelas sesuai alur yang telah disepakati.

Sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, guru memiliki standar mereka sendiri untuk mengukur sejauh mana anak ABK dapat memahami materi. Namun demikian, modul ajar yang dirancang oleh guru tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dari berbagai perbedaan karakteristik, sesuai standar cakupan modul seperti: deskripsi, tujuan, alur proyek, dimensi, dan elemen, target pencapaian fase, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, tindak lanjut, asesmen, dan lain sebagainya. Hal ini disangkutkutkan pada perspektif bahwa guru adalah orang yang paling sering dan paling dekat dengan siswa di sekolah (Fatimah et al., 2023). Sehingga dalam keterlaksanaan alur kegiatan P5, guru perlu menyusun modul ajar sebagai referensi serta acuan kegiatan untuk menciptakan pendampingan yang setara bagi seluruh peserta didiknya terutama bagi siswa ABK agar dapat

mencapai standar keberhasilan yang diinginkan. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun materi ajar yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa, SMAN 1 Gedangan juga memberikan pelatihan penyusunan modul ajar P5 sebagai salah satu usaha untuk mencapai tingkat keberhasilan proyek P5. Proses pelatihan ini dilakukan secara mandiri oleh seluruh guru dan tenaga pendidik, yang tentunya tetap mendapat pengawasan dari komite sekolah. Beberapa langkah penyusunan modul tersebut melalui beberapa langkah (Ummah et al., 2024):

1. Tahap pertama kegiatan yakni Pelatihan, Kegiatan ini mencakup,
 - a. Identifikasi Peserta: Peserta pelatihan terdiri dari guru-guru yang memiliki anak ABK di kelas mereka.
 - b. Penyusunan Materi: Materi disusun berdasarkan kebutuhan dan profil peserta, dengan fokus pada prinsip P5.
 - c. Pengaturan perlengkapan dan sarpras: Tempat, waktu, dan alat bantu pelatihan disiapkan dengan baik untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.
 - d. Pengenalan Konsep P5 dari penyelenggara: pemahaman mendalam tentang P5 dan bagaimana modul ajar dapat membantu implementasi kegiatan P5
2. Tahap Pelaksanaan: Tahap ini terdiri dari sesi materi dan praktik penyusunan modul.
 - a. Sesi Materi meliputi,
 - 1) Teori Penyusunan Modul: Peserta diajarkan tentang struktur dan komponen yang efektif dari modul ajar.
 - 2) Prinsip-prinsip P5: Pemahaman tentang nilai Pancasila yang harus diintegrasikan dalam penyusunan modul ajar.
 - b. Praktik Penyusunan Modul yakni Peserta dibagi ke dalam kelompok untuk melakukan tugas berikut,
 - 1) Membuat Rencana Modul: Menentukan tema dan tujuan pembelajaran
 - 2) Menyusun Konten: Buat konten yang relevan dan menarik dan buat aktivitas yang mendukung pembelajaran aktif.

c. Presentasi dan diskusi: setelah penyusunan, setiap kelompok mempresentasikan dan membahas modul yang telah dibuat,

1) Memberikan Masukan: Peserta lain dan fasilitator memberikan komentar konstruktif

2) Berbagi Pengalaman: Diskusi tentang masalah dan solusi yang ditemukan selama proses penyusunan.

3. Tahap Akhir yakni Evaluasi, Pelatihan diakhiri dengan sesi evaluasi yang mencakup:

4. Refleksi Peserta: Peserta diminta untuk memberikan komentar tentang pelatihan, termasuk hal-hal yang mereka sukai dan apa yang perlu diperbaiki.

5. Penilaian Modul: Kriteria yang telah ditetapkan digunakan untuk menilai modul yang dibuat.

6. Rencana Tindak Lanjut: Diskusi tentang langkah-langkah selanjutnya untuk menerapkan modul ajar di kelas. Selanjutnya demi menjaga kualitas dan relevansi modul ajar yang dirancang oleh guru, pelatihan serupa harus dilaksanakan secara berkala ke depan. Diharapkan hasil pelatihan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam satuan pendidikan serta mendukung keberlangsungan kegiatan P5.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru reguler di sekolah inklusif mendampingi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang membantu siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi secara aktif, meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam kegiatan berbasis proyek. Penelitian ini baru-baru ini menekankan peran guru reguler sebagai pendamping utama P5 dengan menggabungkan prinsip pendidikan inklusif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kolaborasi dengan guru pendamping khusus (GPK). Prinsip-prinsip ini masih jarang dipelajari secara menyeluruh dalam penelitian P5 di sekolah menengah atas di Indonesia.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup satu satuan pendidikan, sehingga generalisasi temuan ke sekolah inklusif lain dengan karakteristik berbeda masih terbatas. Kedua, data penelitian lebih banyak bersumber dari wawancara guru reguler dan observasi pelaksanaan P5, sementara perspektif siswa berkebutuhan khusus dan orang tua belum digali secara mendalam, sehingga pemahaman terhadap pengalaman belajar siswa masih didominasi sudut pandang pendidik. Ketiga, penelitian ini belum mengukur dampak pendampingan P5 secara kuantitatif, misalnya melalui instrumen penilaian keterlibatan,

kemandirian, atau capaian profil pelajar Pancasila pada siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), memperluas lokasi penelitian ke berbagai sekolah inklusif, serta melibatkan suara siswa dan orang tua secara lebih intensif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendampingan P5 dalam pendidikan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* bagi siswa berkebutuhan khusus di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo dapat terlaksana secara efektif melalui kerja sama yang erat antara guru reguler dan guru pendamping khusus (GPK). Pelaksanaan P5 tidak hanya bertumpu pada strategi pembelajaran yang disusun dalam forum perencanaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap guru reguler yang menunjukkan kepedulian, kesabaran, dan kemampuan memahami kondisi setiap siswa. Penyelenggaraan proyek P5 selama satu minggu penuh pada setiap tema memberikan ruang bagi guru untuk mengamati perkembangan, minat, dan potensi siswa berkebutuhan khusus secara lebih komprehensif. Ketersediaan guru GPK berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pendampingan P5 sekaligus mendorong dan memotivasi guru reguler untuk terus belajar dan mengoptimalkan peran mereka meskipun tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah inklusif tetap dapat melaksanakan program P5 secara efektif sepanjang guru reguler memperoleh dukungan yang jelas, pelatihan yang memadai, dan menjalin komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan sekolah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan inklusif dan pembelajaran berbasis proyek dengan menegaskan keterkaitan antara profesionalisme dan kemandirian guru reguler dengan efektivitas pendampingan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* bagi siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini memberikan perspektif bahwa keberhasilan P5 di sekolah inklusif tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran guru pendamping khusus, melainkan juga oleh kapasitas guru reguler dalam mengadaptasi strategi pembelajaran dan pendampingan yang inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi sekolah dalam menyusun kebijakan dan praktik pendampingan P5 yang lebih adaptif melalui penguatan kompetensi guru reguler yang

berkolaborasi dengan guru pendamping khusus serta pengembangan modul P5 yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya mencakup satu satuan pendidikan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu dan jumlah partisipan membatasi kedalaman eksplorasi terhadap variasi praktik pendampingan P5 di kelas inklusif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan pada berbagai sekolah inklusif dengan pendekatan *longitudinal* guna mengkaji keberlanjutan profesionalisme guru reguler dalam pendampingan P5. Penelitian berikutnya juga perlu mengembangkan dan menguji model pendampingan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan P5 bagi siswa berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustaria, R., Lingga, Y., Sitorus, A. M., Silalahi, S. H., & Ritonga, R. (2025). Peran dan Tantangan Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(4), 180–188. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i4.1956>
- Ardelin, A. P., & Sunarso, A. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Membentuk Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Karanganyar Gunung 02. *YASIN*, 5(1), 255–270. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4818>
- Bayhaqi, H. N., Ilham, M., & Badriyah, L. (2024). Kompetensi Guru PAI dalam Kurikulum Merdeka di Era Digital. *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 6(3), 128–136. <https://doi.org/10.36088/pandawa.v6i3.4957>
- Dewi, W. P., Anriani, N., & Sudadio. (2024). Pembelajaran Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 6(2), 11410–11419. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5149>
- Fatimah, S., Trisnawati, O. R., Rinawati, A., Fauziah, M., & Nurhidayah. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Inklusi. *Prosiding Seminar Internasional*, 1(1), 1–13.
- Gibtia, M., Sulastri, M., & Rachman, I. F. (2025). Evaluasi Kesiapan Sekolah Reguler dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(4), 487–494.
- Guru, P. (2025). *SMAN 1 Gedangan*.
- Habibah, N., Abduh, M., & Nizaar, M. (2024). Penguatan Guru Pendamping Khusus Non Pendidikan Luar Biasa dalam Menangani Siswa Berkebutuhan Khusus. *Buletin KKN Pendidikan*, 6(1), 61–75. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v6i1.23652>
- Imrotin, & Badrih, M. (2023). *Pedoman P5 Suara Demokrasi*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/pedoman-p5-suara-demokrasi/>
- Kasman. (2020). Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(2), 514–519.

- Khotrunada, A., & Widiyanah, I. (2024). Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Yogyakarta). *e-Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 12(1), 247–261. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/70280>
- Mahardhika, F., & Sujarwanto. (2024). Implementasi Pembelajaran Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di Bidang Keterampilan Vokasional Siswa Disabilitas Rungu. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(4). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/64433>
- Munawir, Septya, N. M., Amalia, R., & Muallifa, Z. (2025). Tantangan dan Strategi Guru Profesional dalam Menangani Keberagaman Siswa di Pendidikan Inklusif. *Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan*, 6(2), 275–283.
- Musfah, J. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan & Sumber Belajar: Teori dan Praktik*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Mustika, D., Romadan, S., & Jelita, W. (2025). Peran Guru dalam Mendukung Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas Inklusif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19044–19051. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29198>
- Ratnaningrum, I., Hidayat, W., & Annisa, T. R. (2025). Analisis Problematika Guru dalam Menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 319–327. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5379>
- Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67–75. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i1.609>
- Rosmiati, Hamsiah, A., & Rahmaniah. (2025). Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Terhadap Pembelajaran Karakter Pada Siswa Inklusi di SD Negeri Unggulan Mongisidi I Makassar. *Bosoma Journal of Education*, 5(2), 250–258. <https://doi.org/10.35965/bje.v5i2.5309>
- Septianingsih, M. A., Pangayom, A. E., Rohmah, A. A., & Minsih. (2024). Strategi Guru Pendamping untuk Mendorong Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas Reguler. *Jurnal Satya Widya*, 40(2), 128–142. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2024.v40.i2.p128-142>
- Tomlinson, C. A., & Imbeau, M. B. (2023). *Leading and managing a differentiated classroom* (2nd ed.). ASCD.
- Ummah, U. S., Dewantoro, D. A., Susilawati, S. Y., Valentina, T., & Mahereni4, M. R. S. (2024). Penyusunan Modul Ajar P5 sebagai Upaya Meningkatkan Literasi dan Karakter Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif SDN Junrejo 01 Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9238–9241. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/cdj/article/download/35437/23396>